



## Dintib Tertibkan 1.476 APK

**YOGYA, TRIBUN** - Setelah melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) selama lima hari, sejak awal minggu lalu, baru 1476 APK yang ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta.

Jumlah tersebut tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan total jumlah APK yang melanggar aturan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Yogyakarta.

Kasi Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, menyebutkan, ada kendala yang ditemui di lapangan ketika melakukan operasi penertiban APK. Dalam menindaklanjuti dua rekomendasi yang diajukan Panwaslu, Bayu mengaku memiliki kesulitan melepas APK-APK yang ada, karena ada beberapa APK yang ditempatkan di posisi sulit.

"Dari hasil penertiban yang kemarin dilakukan lima hari, ada 1.476 APK yang ditertibkan. Ada banyak kendala yang ditemui saat melakukan penertiban berdasarkan rekomendasi 11.000 APK dari Panwaslu," kata Bayu kepada wartawan *Tribun Jogja*, Minggu (16/3).

Menurut Bayu, dari 11.000 APK yang direkomendasikan, sebagian besar adalah stiker. Sehingga Dintib kesulitan melakukan eksekusi. Selain ada beberapa APK, semisal bendera yang dipasang di atas pohon dan tiang-tiang listrik, dimana hal

■ Bersambung ke Hal 14

## Dintib Tertibkan

Sambungan Hal 13

tersebut membuat petugas di lapangan kesulitan karena harus berhati-hati melakukan penertiban.

Ketika ditanya mengenai sisa APK yang belum ditertibkan, Bayu menyebutkan hal tersebut akan dievaluasi kembali. Selain harus melihat kondisi yang ada saat ini, dimana masa kampanye terbuka sudah mulai digelar, sehingga faktor keamanan harus

diperhatikan.

"Kami akan rapat dengan polisi yang selama ini mengawal penertiban. Selain harus melihat kondisi yang ada, karena polisi saat ini juga melakukan tugas pengamanan kampanye. Sehingga akan sangat kondisional, melihat situasi apakah kondusif atau tidak," kata Bayu.

Dari pengamatan wartawan *Tribun Jogja*, memang ada be-

berapa kondisi yang menyebabkan tidak optimalnya penertiban APK. Semisal adanya insiden penghadangan saat petugas ingin melakukan penertiban.

Komisioner Bawaslu DIY Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Sri R Werdiningsih, mengatakan, penertiban APK tidak selalu berakhir tuntas. Ia berharap agar Pemda maupun Pem-

kot melalui Satpol PP untuk lebih luas dalam melakukan penertiban APK.

"Dari evaluasi, APK tidak pernah tuntas dibersihkan semua. Kami juga menyesalkan adanya insiden penghadangan, itu tidak akan terjadi jika peserta pemilu mengetahui aturan dalam memasang APK, kalau itu dipatuhi tidak ada penertiban paksa," ujar Sri. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005